

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sahbani, *Mahkamah Konstitusi Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap--/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.
- Akbar Asfihan, “*Teleconference* adalah”, Web Portal Ilmu Pengetahuan 23 Februari 2021, Online, Internet, 10 Agustus 2021, <https://adalah.co.id/teleconference/>.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. Diakses dari: https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_penelitian_kualita/UVRtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Anidah Nurhatifah, 2016, Skripsi, “*Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dihubungkan dengan KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dapat diakses melalui: <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5159>.
- Asep Maulana, 2020, “*Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*”, Universitas Negeri Jakarta. Dapat diakses melalui: <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/9940>.
- David Hari Sanjaya, 2018, Skripsi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus)*”, Semarang: Fakultas Hukum Unissula. Dapat diakses melalui: <http://repository.unissula.ac.id/11671/>.
- Dian Erdianto dan Eko Soponyono, 2015, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media Teleconference di Indonesia*”, *Law Reform*, Vol. 11 No. 1. Dapat diakses melalui: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15756>.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hukum Online, “*Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara E-Court Naik 295 Persen*”, Internet, Selasa 19 Mei 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen?page=all/>.
- Ida Kristiana, 2016, Tesis, “*Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Kebijakan Hukum Pidana (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)*”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dapat diakses melalui: <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8795>.
- Jemmy Mariangi, 2013, “*Tinjauan Yuridis tentang Pemeriksaan Saksi Di Persidangan melalui Teleconference*”, Fakultas Hukum Tadulako, Edisi 4 Vol. 1. Dapat diakses melalui: <https://www.neliti.com/publications/151923/tinjauan-yuridis-tentang-pemeriksaan-saksi-dipersidangan-melalui-teleconference>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*New Normal di Tengah Pandemi Covid-19*”, Artikel DJKN 9 Juni 2020, Online, Internet, 2 Oktober 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Diakses dari: https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8370.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lulu Azmi Sharfina, 2018, Skripsi, “*Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang Disampaikan secara Teleconference di Persidangan*”, Yogyakarta: Fakultas

- Hukum Universitas Islam Indonesia. Dapat diakses melalui: <https://edoc.uui.ac.id/handle/123456789/8119>.
- Mas'udi, Wawan dan Poppy S. Winanti, 2020, *New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Diakses dari: <https://digitalpress.ugm.ac.id/book/282>.
- Nitralia Prameswari dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2015, “*Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana*”, *Verstek*, Vol. 3 No. 2. Dapat diakses melalui: <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38980>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Diakses dari: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Perkara Persidangan Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7955>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>.
- Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146890/perwali-kota-semarang-no-57-tahun-2020>.
- Ruth Marina Damayanti Siregar, 2017, “*Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana*”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1. Dapat diakses melalui: <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218>.
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*, Padang: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, *Jurnal Ensiklopedia*, Vol 1 No. 2 Edisi 2. Diakses dari: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/94/91>.
- Simandjuntak, Marcella Elwina, 2020, Sidang Pengadilan On-line: Masa Pandemi Covid-19, dalam di Rumah Unika : *Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19*

- oleh Unika”, 2020, Heny Hartono (ed.), Semarang: UPT Penerbitan Unika Soegijapranata.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Subekti, R, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnja Paramita.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Swindy A. J. Tintigon, 2014, “Kesaksian Saksi Melalui Teleconference dalam Persidangan di Pengadilan”, *Lex Et Societatis*, Vol. 2 No. 8. Dapat diakses melalui:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6185>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Diakses dari:
<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1713.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Diakses dari:
<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/755.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diakses dari: https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2006_13.pdf.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diakses dari: https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_24.pdf.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahdi Mifta Huddin, 2018, Skripsi, “Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung dalam Pengungkapan Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dapat diakses melalui:
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33579>